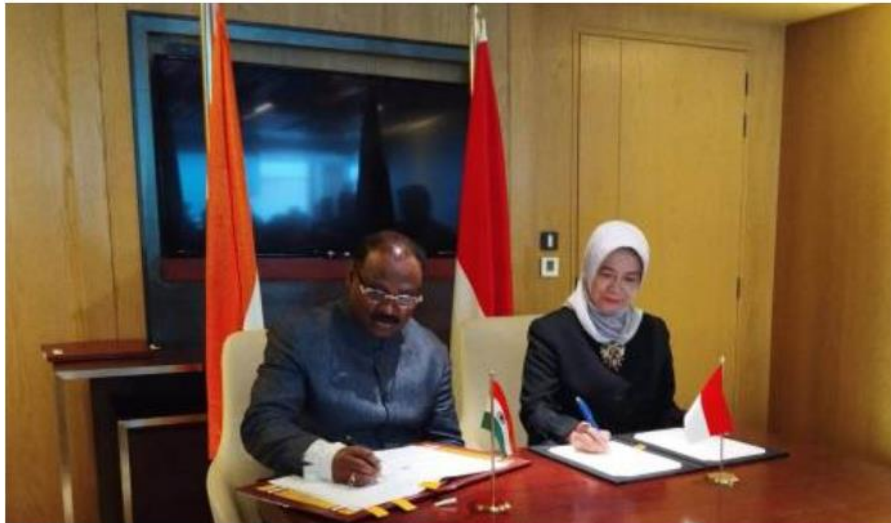


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TANDATANGANI MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING DENGAN STATE AUDIT INSTITUTION INDIA,  
PERKUAT KERJA SAMA BILATERAL**



*bpk.go.id*

SuaraPemerintah.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Lembaga Pemeriksa Keuangan India atau State Audit Institution (SAI) India sepakat untuk melakukan penguatan kerja sama bilateral melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Penandatanganan MoU tersebut dilakukan pada sela-sela pertemuan SAI20 Summit oleh Ketua BPK, Isma Yatun, bersama dengan Comptroller & Auditor General (CAG) India, Shri Girish Chandra Murmu, pada Senin (12/6), di Goa, India.

Dalam penandatanganan MoU tersebut, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan didampingi oleh Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, Inspektur Utama BPK, I Nyoman Wara, Kepala Biro Humas dan KSI, R. Yudi Ramdan Budiman, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Kusuma Ayu Rusnasanti. Sedangkan dari SAI India, Comptroller and Auditor General India didampingi oleh Deputy Comptroller and Auditor General, Paveen Mehta, Additional Deputy CAG, Subramanian, dan Principal Director of International Relation, Eti Shukla.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menjelaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan suatu langkah formal dari komitmen kedua lembaga untuk saling meningkatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam bidang audit sektor publik, termasuk pengembangan metodologi pemeriksaan pada berbagai topik. MoU ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan dan profesionalnya dalam bidang audit sektor publik.

Selama ini, BPK dan SAI India memiliki kesamaan minat, khususnya dalam bidang audit lingkungan hidup, IT audit, dan bidang lainnya melalui keterlibatan BPK dan SAI India dalam kelompok kerja INTOSAI yang sama, yaitu INTOSAI Committee on Knowledge Sharing and Knowledge Services – (KSC) dan INTOSAI Working Group on IT Audit (WGITA).

Melalui MoU, diharapkan kerja sama kedua SAI dapat terus ditingkatkan guna memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan kontribusi lembaga bagi peningkatan pengelolaan keuangan sektor publik di negara, kawasan dan dunia.

**Sumber Berita:**

1. <https://suarapemerintah.id/2023/06/bpk-tandatagani-mou-dengan-sai-india-perkuat-kerja-sama-bilateral/2/>, BPK Tandatagani MoU dengan SAI India, Perkuat Kerja Sama Bilateral, Kamis 15 Juni 2023
2. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-dan-sai-india-perkuat-kerja-sama-bilateral-dengan-penandatanganan-mou>, BPK dan SAI India Perkuat Kerja Sama Bilateral Dengan Penandatanganan Mou, Selasa 13 Juni 2023

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

- a. Pasal 1 ayat 1: Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
- b. Pasal 5 ayat 1: Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.